



Anggota Dewan Divonis Bebas, Jaksa Siapkan Kasasi

DENPASAR, NusaBali

Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar kepada anggota DPRD Jembrana, I Made Sueca Antara alias Dek Cok dalam kasus dugaan korupsi BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi.

"Kami belum berkoordinasi dengan pimpinan (Kajari Jembrana, red). Tapi kami pastikan akan mengajukan kasasi," ujar JPU Suhadi yang juga merupakan Kasi Pidsus Kejari Jembrana, Kamis (29/10). Ia mengatakan putusan tersebut berbanding terbalik dengan tuntutan yang diajukan sebelumnya.

Dalam tuntutan, anggota dewan

dari Fraksi PDIP ini dituntut penjara 1,5 tahun ditambah denda Rp 50 juta subsidi 6 bulan penjara ditambah mengembalikan kerugian negara Rp 122 juta. "Kami sudah menyiapkan memori kasasi untuk segera dikirimkan ke MA dalam waktu dekat," bebarnya.

Sementara itu, IB Panca Sidharta yang merupakan kuasa hukum Sueca menyatakan putusan majelis hakim ini sudah tepat. Apalagi selama sidang, JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya, salah satunya terkait penyalahgunaan wewenang Sueca yang merupakan anggota DPRD Jembrana.

Ia mengatakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Disperindagkop Jembrana sudah sesuai prosedur dan tidak ada tekanan dari terdakwa sebagai

anggota dewan. "Tidak pernah ada tekanan dari terdakwa. Karena pada rekomendasi pertama Disperindagkop mengeluarkan rekomendasi karena semua sudah sesuai prosedur," jelasnya.

Selain itu sudah ada dua terpidana yang diputus dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri (PN) Jembrana. Sementara Sueca yang juga menjadi terdakwa dalam perkara yang sama dijerat pasal korupsi.

"Sudah ada dua pengelola UD Sumber Maju yang divonis bersalah di PN Jembrana dalam kasus migas. Sementara terdakwa (Sueca, red) dalam perkara sama dijerat pasal korupsi. Ini kan tidak bisa," pungkasnya. Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar pimpinan Achmad

Peten Sili menyatakan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dakwaan primer pasal 2 dan subsidair pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU No 20 Tahun 2001, tidak terbukti.

Berdasar pertimbangan tersebut, majelis hakim akhirnya memutuskan terdakwa Sueca yang merupakan politisi PDIP ini dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum pidana tipikor. "Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari penahanan kota, juga dipulihkan harkat dan martabatnya, serta membebaskan biaya perkara kepada negara," tegas majelis hakim dalam amar putusannya. **rez**

Edisi : Jumat, 30 Oktober 2015

Hal : 5



Dana Perimbangan Pusat Masih Gabeng

SINGARAJA, NusaBali

Dana perimbangan pusat tahun 2016, berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), ternyata belum ada kepastian. Padahal Pemkab Buleleng targetkan pembahasan APBD induk 2016 rampung tanggal 9 November 2015.

Data dihimpun, Pemkab Buleleng kini tengah mengejar informasi soal kepastian jumlah DAU dan DAK dari Pemerintah pusat. Masalahnya, hingga memasuki akhir bulan Oktober 2015 ini, jumlah DAU dan DAK untuk Buleleng belum ada kepastian. Disisi lain, Pemkab Buleleng telah mengajukan nota pengantar keuangan RAPBD induk 2016 kepada lembaga DPRD Buleleng. Bahkan nota keuangan itu sudah sempat dibahas oleh Badan Anggaran (Bangar) DPRD Buleleng bersama tim APBD Pemkab. Buleleng sendiri targetkan, APBD induk 2016 itu rampung dibahas tanggal 9 Nopember nanti.

Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka yang ditemui di ruang kerjanya Kamis (29/10) mengakui, jika angka-angka dalam nota keuangan sifatnya masih sangat sementara. Angka-angka itu dipasang berdasarkan pendekatan-pendekatan birokratis dan teknokratis. Disebutkan, untuk DAU dan DAK, anggaran yang dipasang masih mengacu pada APBD induk 2015. "Angka pastinya memang setelah APBN ketok palu," kata Puspaka.

Dalam nota keuangan yang

disampaikan pemerintah kepada DPRD Buleleng, disebutkan dana perimbangan pada tahun 2016 dirancang sebesar Rp 980,04 miliar. Turun 1,38 persen dibandingkan anggaran tahun 2015 yang sebesar Rp 993,7 miliar. Angka itu terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 36,6 miliar, DAU sebesar Rp 868,5 miliar, serta dana alokasi khusus sebesar Rp 88,5 miliar. DAU dan DAK tersebut masih sama dengan angka di tahun 2015, karena untuk tahun 2016 belum ada kepastian.

"Rencananya APBN kan ketok palu tanggal 30 Oktober ini. Mudah-mudahan tepat waktu, sehingga kami bisa pastikan angka-angka dana perimbangan. Kalau sudah pasti dan lancar, tanggal 9 November targetnya sudah ketok palu," imbuh Puspaka.

Penetapan APBD 2016 pada bulan November, kata Puspaka, bukan tanpa alasan. Pemerintah berharap verifikasi dari Pemerintah Provinsi Bali sudah selesai pada pertengahan Desember 2015, sehingga tahapan-tahapan pengadaan yang melalui proses tender, bisa dilakukan pada bulan Desember.

Selanjutnya pada bulan Januari 2016, sudah bisa dilakukan tahapan-tahapan pembangunan. "Tentu nanti pembahasannya harus maraton, kami sudah terbiasa dengan hal tersebut, sehingga kami optimis, APBD 2016 itu bisa ketok palu sesuai target," terangnya. **k19**

Edisi : Jumat, 30 Oktober 2015

Hal : 4



Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Lemukih

Dua Saksi Kunci

Sudutkan Kedua Terdakwa

DENPASAR, NusaBali

Dua saksi kunci dihadirkan dalam sidang dugaan korupsi pembangunan jembatan di Desa Lemukih, Buleleng dengan dua terdakwa, yaitu Wayan Wenten yang merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Hj Arisya Agustina yang merupakan rekanan proyek.

Dua saksi kunci yang dihadirkan masing-masing I Made Suitra, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sudah divonis 1 tahun penjara dalam kasus yang sama dan I Made Sudiawan yang merupakan kontraktor lokal yang mendapat sub kontrak dari kontraktor sebelumnya CV Aristya Prima Ayu.

Sudiawan yang diperiksa pertama mengaku sub kontrak dari CV Aristya ke

dirinya sudah sepengetahuan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buleleng. Namun

ia tidak pernah mengetahui terkait pengajuan progress pembangunan jembatan un-



TERDAKWA kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Lemukih di Buleleng, Hj Arisya Agustina (kanan) dan Wayan Wenten (kiri) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, 20 Oktober lalu.

tuk termin I yang disebut sudah mencapai 45 persen untuk mencairkan uang tahap I. Malah Sudiawan mengaku pada Desember progress pengerjaan jembatan baru 20 persen. "Saya tidak tahu soal progress 45 persen itu," jelasnya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Selasa (27/10).

Bahkan Sudiawan mengaku ditipu Arisya saat pencairan uang tahap I. Saat penarikan uang dari rekening bersama ini, Arisya membawa kabur uang Sudiawan yang saat itu dikatakan akan ditransfer ke rekening miliknya.

"Waktu itu saya ke bank bersama. Lalu Ibu Arisya bilang kalau uang saya mau langsung ditransfer ke rekening saya. Tapi dia malah hilang dari bank dan tidak ada

uang di rekening saya," jelas Sudiawan.

Aristya yang sempat diminta tanggapan soal uang ini membantahnya. Ia mengatakan uang tersebut memang ditahan karena Sudiawan belum mengerjakan pekerjaan sesuai progress 45 persen sesuai kontrak. "Makanya uangnya saya tahan," bebarnya.

Sementara itu, Suitra yang menjadi saksi kedua mengaku jika sub kontrak dari CV Aristya ke Sudiawan sudah menyalahi aturan. Pasalnya tidak ada ketentuan yang menyatakan jika proyek ini bisa disub kontrakkan. "Itu tidak ada dalam kontrak," terangnya. Namun proyek tersebut tetap di sub kontrakkan karena sudah sepengetahuan Kepala Dinas PU saat itu. rez

Edisi : Jumat, 30 Oktober 2015

Hal : 5



Kasus BBM Bersubsidi

Sueca Diputus "Onslag", Jaksa Kasasi

Denpasar (Bali Post) -

Putusan *onslag* yang didapat oknum anggota DPRD Jembrana I Made Sueca Antara dalam kasus korupsi BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi, disikapi serius oleh pihak kejaksaan. Salah satunya adalah jaksa penuntut umum (JPU) memastikan akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

"Kami belum berkoordinasi dengan pimpinan (Kajari). Tapi kami pastikan akan mengajukan kasasi," ujar JPU Suhadi yang juga merupakan Kasipidus Kejari Jembrana pada Kamis (29/10) kemarin.

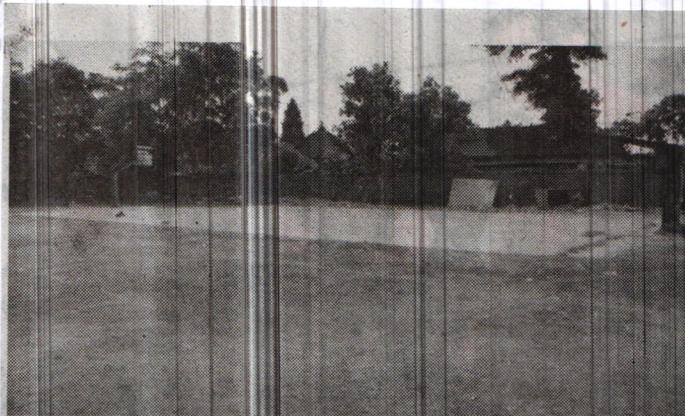
Suhadi mengaku sudah menyiapkan memori kasasi untuk segera dikirimkan ke MA dalam waktu dekat. Sementara itu, I.B. Panca Sidharta, kuasa hukum Sueca menyatakan putusan majelis hakim ini sudah tepat. Apalagi selama sidang, JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya, salah satunya terkait penyalahgunaan wewenang Sueca yang merupakan anggota DPRD Jembrana.

Dikatakan, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Disperindagkop Jembrana sudah sesuai prosedur dan tidak ada tekanan dari terdakwa sebagai anggota dewan. "Tidak pernah ada tekanan dari terdakwa. Karena pada rekomendasi pertama Disperindagkop mengeluarkan rekomendasi karena semua sudah sesuai prosedur," jelasnya.

Selain itu sudah ada dua terpidana yang diputus dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri (PN) Jembrana. Sementara Sueca yang juga menjadi terdakwa dalam perkara yang sama dijerat pasal korupsi. "Sudah ada dua pengelola UD Sumber Maju yang divonis bersalah di PN Jembrana dalam kasus migas. Sementara terdakwa (Sueca, red) dalam perkara sama dijerat pasal korupsi. Ini kan tidak bisa," sebutnya. (kmb37)

Edisi : Jum'at, 30 Oktober 2015

Hal : 2



LAPANGAN umum dan lapangan basket di Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi. • NUSABALI/ARI SISWANTO

Lapangan Umum Kapal Kurang Ideal, Pemkab Gelontor Rp 1,5 Miliar

MANGUPURA, NusaBali

Lapangan umum di Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, kondisinya jauh dari ideal. Padahal, masyarakat setempat kerap menjadikan lapangan ini untuk berbagai aktivitas, terutama bermain sepakbola. Salah satu klub sekolah sepakbola (SSB) Kapal yang cukup disegani sering latihan di lapangan tersebut. Sejumlah sekolah pun bila melakukan kegiatan ekstra kurikuler juga di lapangan ini.

Tak hanya lapangan bola, dari pantauan, Kamis (29/10), lapangan untuk bermain basket juga bernasib serupa. Kondisi lapangan basket secara fisik nyaris sama dengan lapangan sepakbola, kurang terawat. Papan ring basket sudah keropos.

Karena lapangan seperti tak terawat, tak jarang lapangan juga dijadikan arena latihan mengemudi mobil. Sehingga di sana-sini kontur tanahnya tak lagi rata.

Semakin parah bila masuk musim penghujan. Menurut sejumlah warga di lokasi, sebagian lapangan selalu tergenang air. Karenanya, meski sekarang ini musim kemarau, masih kelihatan rumput-rumput hijau. Tapi, menurut warga di lokasi, hal itu bukan karena perawatan melainkan dampak uapan air sungai di timur lapangan bila musim hujan datang. "Kalau hujan banjir di sini," tuturnya.

Kondisinya makin diperparah karena sekeliling lapangan tidak ada saluran pembuangan air, sehingga air hujan dan terkadang luapan air dari sungai tak terserap dengan bagus. Karena kondisinya tak lagi memungkinkan untuk dipakai kegiatan, bahkan kegiatan olahraga pun kini lebih sering dipindah ke Lapangan Mengwi. "Seperti ini sudah sekitar empat tahun. Sekarang sudah jarang ada kegiatan," katanya lagi.

Pemkab Badung pada RAPBD 2016 telah menganggarkan penataan terhadap Lapangan Umum Kelurahan Kapal, sebesar Rp 1,5 miliar. Lurah Kapal Nyoman Sudiarta, mengakui hal itu. Ia mengemukakan, untuk memperbaiki total lapangan bola dan lapangan basket dibutuhkan biaya sekitar Rp 4 miliar.

Dijelaskannya, biaya sebesar itu untuk perbaikan sekaligus menambah beberapa fasilitas seperti pembuatan tribun penonton. Termasuk untuk membuat got mengelilingi lapangan.

"Makanya dengan anggaran Rp 1,5 miliar mungkin tak bisa seluruhnya. Tapi akan kami lakukan bertahap dulu. Rencananya kami buat got mengelilingi lapangan," jelas Sudiarta. Bila memungkinkan pihaknya kembali akan mengusulkan penambahan anggaran pada tahun anggaran berikutnya. as

Edisi : Jum'at, 30 Oktober 2015

Hal : 2



Pemprov Undang Ditjen Otda Kemendagri ✓ Samakan Persepsi Soal Bansos

DENPASAR, NusaBali

Pemprov Bali akan mengundang Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (7/11), khusus untuk menyamakan persepsi terkait pencairan dana bansos/hibah dengan payung hukum Peraturan Gubernur (Pergub). Dalam pertemuan untuk menyamakan persepsi terkait pencairan bansos nanti, Pemprov juga mengundang jajaran DPRD Bali, BPK, dan BPKP.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pемыun, mengatakan penyamaan persepsi penting dibuat antara lembaga-lembaga terkait,

supaya bansos/hibah senilai Rp 46 miliar yang difasilitasi 55 anggota Dewan melalui APBD Perubahan 2015 nanti tidak ada persoalan. Menurut Tjok Pемыun, payung hukum pencairan bansos sebenarnya sudah tidak ada masalah.

Lagipula, Pergub yang diajukan ke Kemendagri sudah dua kali diverifikasi. Pergub ini pun sudah dibawa dari Kemendagri di Jakarta oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Bali, Dewa Putu Eka Wijaya Wardana, Rabu (28/10) lalu.

"Barangnya (Pergub hasil verifikasi Kemendagri) sudah di Bali. Nanti dalam

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5



Sambungan - - -

Samakan Persepsi Soal Bansos ✓

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

pertemuan 7 November 2015 akan kita buka di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Di sana nanti kami akan minta Dirjen Otda Kemendagri menjelaskan semuanya," tandas Tjok Pемыayun yang juga Sekda Provinsi Bali saat dikonfirmasi NusaBali di Kantor Gubernur, Niti Mandala Denpasar, Kamis (29/10).

Tjok Pемыayun menyatakan, Direktur Bidang Produk Hukum Ditjen Otda Kemendagri, Dr Kurniasih SH MH, nantinya juga akan dihadirkan dalam pertemuan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, 7 November 2015, untuk memberikan penjelasan terkait payung hukum Pergub sebagai landasan pencairan bansos.

"Ibu Kurniasih, BPK, BPKP, anggota DPRD Bali, dan jajaran eksekutif harus hadir semuanya dalam pertemuan itu. Nanti dibuatkan berita acara dari pertemuan itu. Dari sisi itu, semua

pihak bisa mendengarkan langsung," tegas birokrat asal Desa Petak, Kecamatan Gianyar yang juga mantan Kepala Bappeda Provinsi Bali ini.

Tjok Pемыayun menyatakan, bansos/hibah tetap diproses kalau sudah ada keputusan SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Proses pencairan bansos/hibah memang cukup panjang, karena terkait penggunaan anggaran. "Sekarang masih jalan prosesnya," kata Tjok Pемыayun.

Ditegaskan Tjok Pемыayun, dasar hukum pencairan bansos/hibah adalah Pergub yang dibuat Gubernur. Pergub harus mendapatkan verifikasi dari Mendagri. "Prosesnya sudah kelar di pusat (Kemendagri). Itu akan dijelaskan Ibu Kurniasih nanti. Apa isinya, mari kita dengar nanti," beber Tjok Pемыayun.

"Sebenarnya, bansos/hibah ini tidak ada masalah. Cuma, interpretasi tentang Surat Edaran (SE) Mendagri dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah supaya tidak macam-macam lagi. Kita

baru bisa menjalankan kalau Kemendagri menjelaskannya."

Nantinya, lanjut Tjok Pемыayun, anggota DPRD Bali, BPKP, dan BPK juga tahu semuanya. "Penjelasan yang sudah kita dapatkan, juga disimak beliau-beliau itu (BPKP, BPK, DPRD Bali). Enak kita kerjanya, karena pemahaman sudah sama," kata Tjok Pемыayun.

Artinya, Pemprov Bali membentengi diri? "Ya, wajiblah kita membentengi diri. Kita samakan persepsi. Notulen rapat jelas kita buat. Memang kalau MoU tidak mendesak dan belum perlu. Hanya perlu penyamaan persepsi saja," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama mengatakan pengajuan proposal bansos/hibah terus berjalan dan proses administrasinya dilakukan di Pemprov. "Memang aka nada pertemuan dengan Ditjen Otda Kemendagri nanti. Kami memang menganjurkan Kemendagri datang ke Bali untuk

menjelaskan semuanya," ujar Adi Wiryatama saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Kamis kemarin.

Menurut Adi Wiryatama, Ditjen Otda Kemendagri juga harus tahu situasi dan kondisi di Bali, sehingga mereka penting terjun ke daerah ini. Pusat harus tahu bahwa bansos/hibah sebagian diperuntukkan bagi pura-pura yang bernaung di bawah desa adat. Dan, jelas itu tidak berbadan hukum.

"Jadi, dalam pertemuan nanti kita akan jelaskan panjang lebar bahwa bansos/hibah ini sangat dibutuhkan masyarakat di Bali. Seperti saya katakan, kalau bansos/hibah sampai tidak cair, maka 1.488 desa adat dan jutaan krama pangempon pura-pura di Bali bisa turun melakukan protes. Makanya, kita berharap 7 November nanti semuanya kelar, tidak ada persoalan lagi," tegas politisi senior PDIP yang mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005 dan 2005-2010) ini. **nat**



Penjabat Bupati Sugiada Serahkan RAPBD Tahun 2016



• IST
PENJABAT Bupati Tabanan Wayan Sugiada bubuhkan tanda tangan disaksikan pimpinan dewan saat serahkan RAPBD tahun 2016 di gedung DPRD Tabanan, Kamis (29/10).

TABANAN, NusaBali

Pemkab Tabanan menyerahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke DPRD Tabanan untuk disahkan

melalui mekanisme sidang paripurna di gedung DPRD Tabanan, Kamis (29/10). Ketiga Ranperda itu masing-masing Rancangan Anggaran Pendapa-

tan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016, Ranperda tentang Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan Ranperda Penyertaan Modal pada PT Jamkrida Bali Mandara Provinsi Bali.

Penjabat Bupati I Wayan Sugiada menguraikan pos pendapatan daerah pada RAPBD tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 1,485 triliun lebih. Rencana tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 80,060 miliar lebih atau 5,70 persen dari APBD tahun 2015. Pos pendapatan daerah itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 251,679 miliar lebih, meningkat sebesar Rp 7,885 miliar lebih atau 3,23 persen dari APBD 2015. Ditambahkan, dana perimbangan sebesar Rp 804,429 miliar lebih dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 429,148 miliar lebih.

Pada pos belanja daerah terjadi peningkatan sebesar Rp 80,860 miliar lebih atau 5,65 persen dari APBD 2015. Dalam APBD 2016, pos ini direncanakan sebesar Rp 1,510 triliun. Pos ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1,104 triliun lebih, mengalami peningkatan Rp 58,975 miliar lebih atau 5,64 persen dari APBD 2015. Serta belanja langsung sebesar Rp 406,489 miliar lebih, mengalami peningkatan sebesar Rp 21,885 miliar lebih atau 5,69 persen dari APBD 2015.

"Untuk dimaklumi, besaran belanja tidak langsung bukan seluruhnya dipergunakan untuk belanja pegawai. Melainkan sebagian untuk belanja lainnya seperti belanja bunga, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan

keuangan, dan belanja tidak terduga," jelas Sugiada.

Dengan perbandingan tersebut, diakui adanya defisit sebesar Rp 25,520 miliar lebih. "Defisit ini akan ditutup dari pembiayaan netto yang dirancang bersumber dari estimasi SILPA (sisa lebih pagu anggaran) 2015 sebesar Rp 40 miliar," jelasnya. Sugiada juga menekankan APBD merupakan anggaran publik yang dicerminkan dalam bentuk angka-angka. Karena itu, semua pihak berkewajiban mengamankan pelaksanaannya agar dapat dilaksanakan dalam waktu setahun. "Konsekwensinya, kita semua dituntut membuat perencanaan yang lebih matang, realistis, dan berkualitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk sumber daya yang tersedia," imbuhnya. **k21**



Ratusan Aset Daerah Belum Bersertifikat

Lahan yang sama sekali belum disentuh proses pensertifikatan berupa ruas jalan kabupaten dan lokasi lahan sekolah.

SINGARAJA, NusaBali

Sebanyak 531 bidang tanah yang tercatat sebagai aset Pemkab Buleleng, ternyata belum bersertifikat. Sebagian besar aset tersebut berupa ruas jalan kabupaten dan lahan sekolah.

Data pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buleleng menyebut, total aset berupa tanah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) kode A mencapai 854 bidang tanah dengan luas mencapai seribu hektar yang tersebar di sembilan kecamatan yang ada.

Dari jumlah tersebut, yang baru disertifikatkan atas nama Pemkab Buleleng mencapai 163 bidang. Sedangkan sisanya ada yang sudah dalam proses sertifikat, tapi ada pula yang sama sekali belum disentuh.

Nah, lahan yang sama sekali belum disentuh tersebut sebagian besar adalah berupa ruas jalan kabupaten dan lokasi lahan sekolah. Luasannya pun sejauh ini belum diketahui secara pasti. Namun jumlah bidangnya diperkirakan mencapai 425 bidang untuk ruas jalan kabupaten.

Khusus untuk lahan sekolah yang belum bersertifikat sebagian besar lahan sekolah dasar (SD). Sedangkan SMP dan SMA/SMK sudah ada tapi masih sangat kecil yakni SMP 1 Banjar, SMA 1 Tejakula dan SMK 1 Busungbiu.

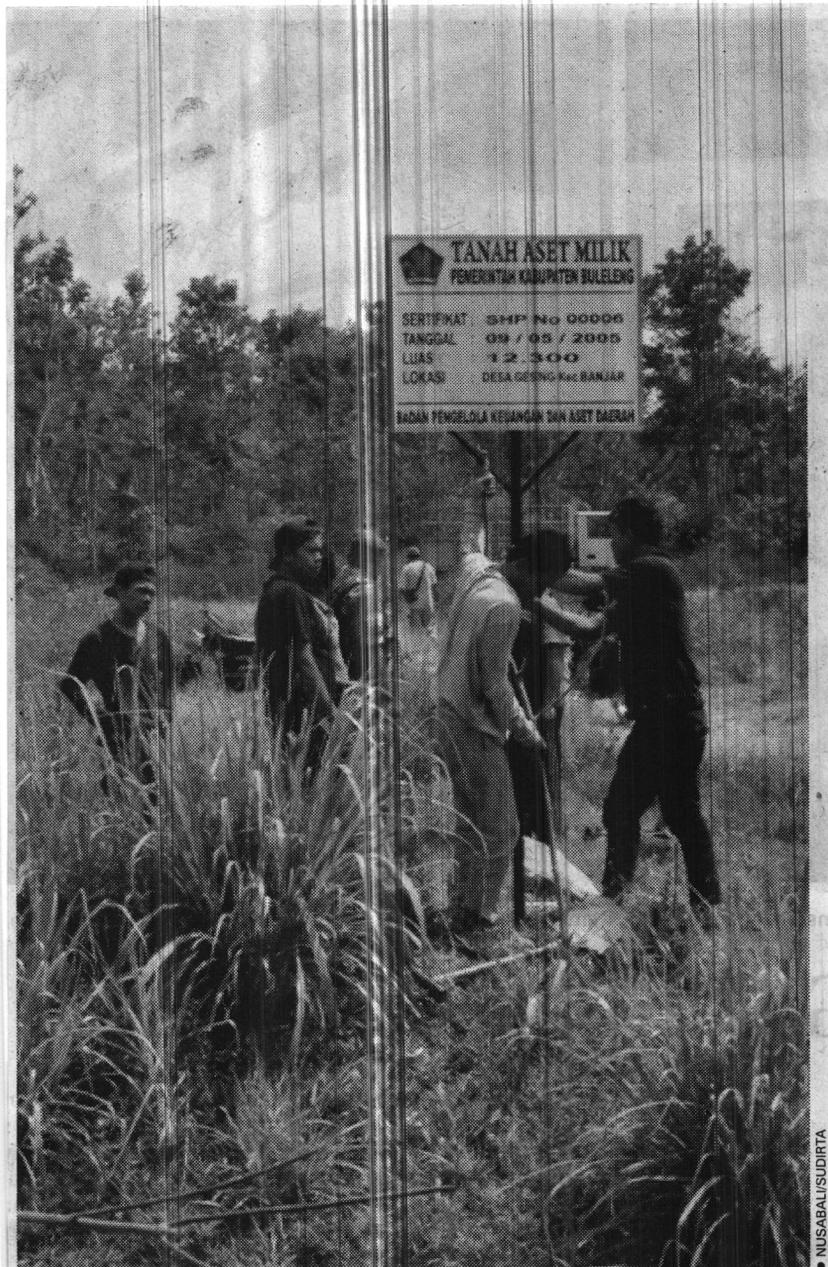
Kasubid Pengamanan Aset BPKAD Buleleng Made Pasda Gunawan, Kamis (29/10) menyebut, pihaknya masih temui banyak kendala dalam pensertifikatan lahan-lahan yang sudah tercatat di KIB kode A. Kendala utama yang sering ditemui adalah mencari tahu sejarah keberadaan lahan tersebut. Karena data-data tersebut menjadi dokumen penting dalam pensertifikatikan.

"Historis antara satu bidang lahan dengan bidang lainnya pasti berbeda. Untuk satu bidang lahan saja, mencari historisnya itu butuh waktu yang lama. Kalau itu sudah lengkap baru kita bisa ajukan ke BPN," terangnya.

Selain kendala historis, Pasda Gunawan juga menyebut, regulasi pensertifikatan ruas jalan sejauh ini belum juga ditemukan. Karena itu, pihaknya belum mengajukan ruas jalan untuk pensertifikatan. "Sertifikat untuk ruas jalan itu, belum kami jadikan prioritas, kami utamakan yang sudah memiliki regulasi dan data historisnya sudah lengkap," imbuhnya.

Sedangkan untuk kendala pensertifikatan lahan sekolah terjadi akibat pihak desa belum mengizinkan pensertifikatan tersebut. Dikatakan, khusus untuk lahan sekolah dasar, hampir sebagian besar lahannya itu milik desa dan ada beberapa milik pribadi. "Kami sudah sosialisasi ke UPP, tapi ketika lahan itu diajukan untuk disertifikatkan, kami kesulitan karena pihak desa belum mengizinkan," ujar Pasda Gunawan.

Kendati demikian, untuk menuntaskan pensertifikatan lahan tersebut, Pasda Gunawan menyebut BPKAD kini telah menjalin kerjasama dengan BPN Buleleng. Dalam kerjasama itu, rata-rata pertahun akan diajukan pembuatan sertifikat itu sampai 100 bidang tanah. **k19**



BPKAD pasang plang sebagai tanda lahan tersebut milik Pemkab Buleleng.



Soal Dana Pilkada, Pemkab Tidak Mesti Beri Jaminan

SINGARAJA, NusaBali

Keinginan KPU Buleleng mendapat jaminan dalam bentuk surat agar dana Pilkada 2017 nanti tersedia di awal tahun 2017, pupus sudah. Pemkab Buleleng tidak akan membuat surat seperti yang diminta KPU.

KPU sendiri minta jaminan dalam bentuk surat, lantaran khawatir dana yang dibutuhkan di awal tahun 2017 tidak tersedia. Kekawatiran itu cukup beralasan, karena dana pada APBD induk, biasanya baru bisa realisasi sekitar bulan Maret. Sedangkan KPU sudah membutuhkan dana cukup besar di awal tahun yakni bulan Januari dan Februari hingga mencapai 17 persen dari total kebutuhan dana pilkada sebesar Rp 46,8 miliar.

Pilkada Buleleng sendiri dijadwalkan berlangsung bulan Februari 2017 nanti. Surat jaminan itu diminta, karena Pemkab Buleleng merancang kebutuhan dana Pilkada itu dirancang dalam dua tahun anggaran, yakni di APBD 2016 dan APBD 2017.

"Kita di pemerintahan tidak perlu hal itu (jaminan,red), tapi performen pemerintah sudah bisa dilihat, bahwa Pemkab Buleleng juga komit mensukseskan Pilkada itu dengan pembahasan anggaran kebutuhan Pilkada," terang Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka, Kamis (29/10).

Ditegaskan, surat jaminan itu tidak mesti dibuat Pemkab, karena Pemkab Buleleng juga punya tanggungjawab terhadap sukses tidaknya Pilkada tersebut. Sehingga KPU tidak minta pun,



PEMBAHASAN dana Pilkada Buleleng di DPRD beberapa waktu lalu.

Pemkab punya kewajiban menyediakan dana yang dibutuhkan. "Kalau sampai tidak jalan Pilkada itu, kan imbaskan ke Pemerintahan juga. Jadi pemerintah daerah itu juga punya tanggungjawab yang besar terhadap suksesnya pilkada itu," imbuh Puspaka.

Menurutnya, pengalokasian kebutuhan dana pilkada itu membutuhkan strategi. Sehingga semua kebutuhan bisa diakomodir secara bertahap. Puspaka menyebutkan, terhadap kebutuhan logistik yang membutuhkan waktu untuk lelang, kebutuhan anggarannya akan disiapkan di tahun 2016, kendati logistik itu dibutuhkan di tahun 2017. Namun untuk kebutuhan dana seperti pembayaran honor di tahun 2017, tetap akan dialokasikan di tahun 2017. "Kalau itu (honor,red) dianggarkan di tahun 2016, dana itu toh akan mengendep dulu, karena

baru dibayarkan di tahun 2017. Alangkah lebih baiknya dana itu dialokasikan pada tahun 2017," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Buleleng Gede Suardana usai pertemuan bisa menerima rancangan dua tahun anggaran untuk dana pilkada tersebut. Namun, pihaknya tetap meminta jaminan dan yang dibutuhkan di bulan Januari 2017 bisa dicairkan. Jaminan itu paling tidak dituangkan dalam bentuk kesepakatan hitam diatas putih.

"Bulan Januari itu bulan yang krusial bagi kami, sehingga jaminan itu bisa dituangkan dalam bentuk MoU, sebagai pedoman dalam penyusunan naskah perjanjian hibah daerah pilkada. Kami akan merasa nyaman kalau ada MoU tersebut dalam penyelenggaraan tahapan pilkada," terangnya. **k19**

Edisi : Jumat, 30 Oktober 2015

Hal : 4